


# Penguatan Literasi Demokrasi Digital Bagi Generasi Muda Dalam Menangkal Disinformasi Politik Di Era Media Sosial

<sup>1)</sup>Dodi Jaya Wardana\*, <sup>2)</sup>Khy's Dihya Ghulam Haqqul Adam, <sup>3)</sup>Natasya Putri Amanda

<sup>1,2,3)</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia  
Email Corresponding: [dodijayawardana@umg.ac.id](mailto:dodijayawardana@umg.ac.id)\*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<b>Kata Kunci:</b> Literasi Demokrasi Demokrasi Digital Generasi Muda Disinformasi Politik Media Sosial	Disinformasi politik di media sosial semakin mengancam kualitas demokrasi, terutama karena generasi muda sebagai pengguna utama platform digital masih memiliki literasi demokrasi yang terbatas. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMK Taruna Jaya Gresik dan bertujuan memperkuat literasi demokrasi digital generasi muda melalui sosialisasi interaktif, pelatihan analisis konten, dan simulasi fact-checking. Kegiatan diikuti oleh 25 peserta selama 1 (satu) hari (5 jam pelatihan efektif). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman peserta mengenai ciri disinformasi, kemampuan verifikasi informasi politik, serta kesadaran etis dalam bermedia sosial. Secara kuantitatif, terjadi peningkatan skor pengetahuan peserta dari rata-rata 4.57% pada pre-test menjadi 79,2% pada post-test, dengan peningkatan pemahaman 73,3%. Temuan tersebut membuktikan bahwa sosialisasi literasi demokrasi digital efektif dalam membangun kemampuan kritis generasi muda dan menjadi langkah strategis untuk menangkal disinformasi politik di era digital. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa sosialisasi literasi demokrasi digital berkontribusi efektif dalam memperkuat kemampuan kritis generasi muda dan dapat dijadikan strategi penting dalam menangkal disinformasi politik serta mendukung penguatan demokrasi di era digital.
<b>Keywords:</b> Democratic Literacy Digital Democracy Young Generation Political Disinformation Social Media	<b>ABSTRACT</b> Political disinformation on social media increasingly threatens the quality of democracy, particularly because young people who are the primary users of digital platforms still have limited democratic literacy. This community engagement program was carried out at SMK Taruna Jaya Gresik and aimed to strengthen the digital democratic literacy of young people through interactive socialization, content analysis training, and fact-checking simulations. The activity was attended by 25 participants over one day (5 hours of effective training). The results show a significant increase in participants' understanding of the characteristics of disinformation, their ability to verify political information, and their ethical awareness in using social media. Quantitatively, there was an increase in knowledge scores from an average of 4.57% on the pre-test to 79.2% on the post-test, indicating a 73.3% improvement in understanding. These findings demonstrate that digital democratic literacy socialization is effective in building the critical thinking capacity of young people and serves as a strategic step to counter political disinformation in the digital era. The conclusion of this activity affirms that strengthening digital democratic literacy contributes effectively to enhancing the critical ability of young people and can be considered an important strategy for combating political disinformation and supporting the reinforcement of democracy in the digital era.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## I. PENDAHULUAN

Percepatan digitalisasi dan penetrasi media sosial di Indonesia telah mengubah lanskap komunikasi politik secara dramatis. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook menjadi arena utama bagi generasi muda untuk mengakses, berdiskusi, dan menyebarkan informasi politik (Sari, 2025). Di satu sisi, ini membuka peluang partisipasi politik yang lebih luas, inklusif, dan dinamis. Namun, di sisi lain, era

digital juga melahirkan tantangan besar berupa disinformasi politik yang semakin marak, terutama menjelang kontestasi electoral (Komara & Widjaya, 2024). Disinformasi, yaitu informasi yang salah atau menyesatkan yang disebar dengan sengaja, dapat merusak kualitas demokrasi karena menyesatkan publik, mempolarisasi opini, dan menurunkan kritisisme politik. Dalam konteks Indonesia, generasi muda sebagai kelompok demografis yang sangat aktif berinteraksi di media sosial dapat menjadi penyebar sekaligus korban disinformasi (Zaky & Fatih, 2024). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital dan pemahaman etika demokrasi digital, yang menyebabkan sulitnya menyaring mana konten yang benar, mana yang manipulatif (Mustofa, 2024).

Studi menunjukkan bahwa literasi digital di Indonesia belum sepenuhnya kuat dalam segi etika dan kesadaran demokratis. Meskipun indeks literasi digital Indonesia meningkat, terdapat kesenjangan antara keterampilan teknis dan nilai-nilai digital etis: banyak pengguna masih rentan terhadap hoaks dan konten merugikan (Bulya & Izzati, 2024). Sementara itu, peran media sosial dalam pendidikan politik belum sepenuhnya positif kemudian media sosial bisa menjadi katalis partisipasi politik, tetapi juga sumber distorsi apabila disinformasi tidak dikelola dengan baik (Laventia & Faizal, 2025). Mengingat hal tersebut, sosialisasi literasi demokrasi digital menjadi tarif strategis untuk memperkuat daya tangkal generasi muda terhadap disinformasi politik. Program pengabdian masyarakat yang berfokus pada edukasi digital kewarganegaraan, verifikasi fakta, dan etika berbagi konten politik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran kritis generasi muda serta membangun partisipasi politik yang sehat dan bertanggung jawab (Muhamad & Nasoha, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi dinamika literasi politik generasi muda dalam konteks digital seperti kewaspadaan pemilih digital native terhadap hoaks pemilu masih rendah: hanya sebagian kecil responden secara aktif memverifikasi informasi yang mereka terima (Fernandes & Akbar, 2025). Ini menunjukkan bahwa literasi politik digital belum cukup memadai dan membutuhkan intervensi yang lebih struktural. Dalam kajian lain menyoroti aktivisme digital anak muda sebagai bentuk partisipasi politik baru. Aktivisme tersebut berkembang melalui tagar, petisi online, dan konten kritik sosial digital, tetapi juga rentan terhadap polarisasi, ujaran kebencian, dan aktivisme dangkal (Khairuddin, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan politik generasi muda di ranah digital membutuhkan pondasi literasi yang kokoh agar kontribusinya lebih konstruktif daripada destruktif. Lebih lanjut, media sosial membuka ruang komunikasi politik yang lebih partisipatif, namun arus hoaks dan disinformasi dapat memicu polarisasi sosial dan memengaruhi kualitas demokrasi (Umar Yadi Idris, 2025). Dari kajian-kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi demokrasi digital untuk generasi muda merupakan isu multidimensi melibatkan aspek pendidikan, etika, partisipasi, dan struktur teknologi. Meskipun sudah ada penelitian penting, intervensi praktis melalui program pengabdian masyarakat belum banyak diartikulasikan dengan strategi engagement dan edukasi yang sistematis.

Artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah melalui pendekatan sosialisasi literasi demokrasi digital yang bersifat partisipatif, di mana generasi muda tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi diberdayakan sebagai duta literasi yang berperan aktif dalam praktik pelatihan dan kampanye serta membangun jejaring komunitas. Program ini mengintegrasikan pelatihan verifikasi fakta dan etika demokrasi digital untuk memperkuat kemampuan teknis sekaligus menanamkan tanggung jawab moral dalam penyebaran informasi politik. Selain menghasilkan modul sosialisasi yang bersifat berkelanjutan dan dapat direplikasi di berbagai institusi pendidikan dan komunitas pemuda, kegiatan ini juga membentuk jejaring duta demokrasi digital lokal yang mampu melanjutkan dan memperluas dampak program setelah kegiatan pengabdian berakhir.

Pengabdian-pengabdian sebelumnya umumnya berfokus pada penyampaian materi secara satu arah dan hanya menitikberatkan pada pemahaman peserta mengenai bahaya disinformasi politik tanpa menciptakan mekanisme keberlanjutan. Selain itu, sebagian besar program literasi digital tidak mengintegrasikan dimensi etika demokrasi sebagai komponen kunci, sehingga peserta hanya memperoleh keterampilan teknis tanpa penguatan kesadaran moral dalam konsumsi dan diseminasi informasi politik.

Program ini mengadopsi model kaderisasi demokrasi digital dengan menjadikan peserta bukan sekadar audiens, melainkan aktor yang memproduksi konten edukatif, mempraktikkan fact-checking secara langsung, serta menciptakan kampanye literasi di lingkungan sekolah dan komunitas digital mereka. Keberadaan jaringan duta demokrasi digital sebagai output sosial bukan hanya peningkatan kompetensi individu tetapi menciptakan *multiplier effect* yang meneruskan dampak program di luar ruang pelatihan.

Model pembelajaran partisipatif yang diterapkan menempatkan generasi muda sebagai subjek pembelajaran melalui kerja kolaboratif, *peer teaching*, produksi konten, advokasi digital, dan evaluasi

praktik bermedia sosial berdasarkan studi kasus nyata. Cara ini berbeda dari model literasi digital konvensional yang cenderung sebatas ceramah, sosialisasi teori, atau pelatihan teknis tanpa memberikan ruang bagi peserta untuk berperan sebagai agen perubahan sosial. Dengan demikian, program ini membentuk literasi demokrasi yang berbasis aksi (*action-based democratic literacy*), bukan hanya berbasis pemahaman.

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini berangkat dari pertanyaan fundamental mengenai efektivitas sosialisasi literasi demokrasi digital dalam meningkatkan ketahanan generasi muda terhadap disinformasi politik, serta bagaimana keterlibatan aktif peserta dalam program mampu memperkuat dampak dan keberlanjutan kegiatan literasi di komunitas mereka. Dengan demikian, tujuan kajian dalam artikel ini adalah untuk menganalisis efektivitas program sosialisasi dalam meningkatkan kapasitas kritis generasi muda dalam mengidentifikasi dan menangkal disinformasi politik, mengevaluasi kontribusi duta literasi digital sebagai agen edukasi lanjutan, serta mendeskripsikan rancangan modul literasi demokrasi digital yang memiliki potensi replikasi pada berbagai lembaga pendidikan dan komunitas pemuda (Agma, 2025). Artikel ini bertujuan memperkuat landasan akademik dan praksis bagi pengembangan literasi demokrasi digital sebagai strategi fundamental dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia di tengah derasnya arus informasi yang manipulatif pada era media sosial.

## II. MASALAH

Sebagai lembaga pendidikan menengah kejuruan dengan tingkat aktivitas digital yang tinggi di kalangan siswa, SMK Taruna Jaya Gresik menghadapi berbagai permasalahan mendasar terkait literasi demokrasi digital. Meskipun peserta didik sangat aktif menggunakan media sosial, sebagian besar belum memiliki kemampuan kritis dalam memahami, memilah, dan memverifikasi informasi politik yang mereka konsumsi, sehingga menjadikan mereka rentan terhadap konten provokatif, partisan, dan menyesatkan. Kerentanan ini semakin diperburuk menjelang momentum politik nasional, ketika arus disinformasi meningkat dan memicu polarisasi opini di antara siswa. Selain itu, literasi demokrasi digital belum terintegrasi secara sistematis ke dalam pendidikan karakter dan kewarganegaraan, karena materi tentang etika bermedia, tanggung jawab warga digital, dan nilai-nilai demokrasi belum memperoleh porsi pengajaran yang memadai. Guru maupun pembina OSIS juga masih menghadapi keterbatasan kapasitas dalam melakukan pendampingan terkait isu disinformasi politik dan etika digital akibat minimnya pelatihan dan ketiadaan panduan implementatif. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak tersedianya kegiatan kolaboratif yang mendorong siswa berperan sebagai agen literasi demokrasi, karena kegiatan sekolah lebih banyak menekankan aspek teknis penggunaan teknologi ketimbang pendidikan nilai-nilai demokratis. Akibatnya, budaya digital di lingkungan sekolah belum berkembang ke arah ruang diskusi kritis dan partisipatif, melainkan masih didominasi oleh konten promosi dan hiburan, sehingga gagal menumbuhkan kebiasaan berpendapat secara etis, saling menghargai, serta berpikir rasional dalam ruang digital.



Gambar 1: Saat kunjungan ke sekolah SMK Taruna Jaya Gresik

### III. METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan siswa SMK Taruna Jaya sebagai kelompok sasaran utama karena tingginya kerentanan mereka terhadap disinformasi politik di media sosial (Wardle, 2017). Pelaksanaan program mengikuti prosedur terstruktur melalui beberapa langkah, yaitu (1) pembukaan dan pemetaan pengetahuan awal peserta melalui pre-test, (2) sosialisasi interaktif mengenai konsep literasi demokrasi digital, pola penyebaran disinformasi, dan etika bermedia sosial melalui paparan, video edukatif, dan studi kasus sesuai model pembelajaran partisipatif (Ihle, 2018), (3) pelatihan praktik identifikasi konten menyesatkan dan penggunaan alat verifikasi digital berbasis *digital inquiry* (Nathanael, 2023), (4) diskusi kelompok dan refleksi kritis untuk memperkuat argumentasi dan kesadaran etis (Mihailidis, 2018), (5) simulasi kampanye literasi digital untuk mendorong tindakan dan partisipasi aktif peserta di lingkungan sekolah dan media sosial, serta (6) pelaksanaan post-test, observasi, dan umpan balik untuk mengukur efektivitas program. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta dengan durasi 1 (satu) hari pelaksanaan atau 5 jam pelatihan efektif. Peserta dipilih berdasarkan kriteria keterlibatan aktif pada organisasi siswa, penggunaan media sosial yang intensif, serta kesediaan untuk menjalankan peran sebagai agen literasi digital di lingkungan sekolah. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test berbentuk soal pilihan ganda dan studi kasus analitis yang dirancang untuk mengukur pemahaman konsep serta kemampuan verifikasi informasi. Instrumen telah melalui uji validitas isi (*content validity*) melalui penilaian pakar dan uji reliabilitas dengan koefisien reliabilitas  $> 0,70$  sebagai indikator konsistensi. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan kemampuan verifikasi informasi dan kesadaran etis siswa, menegaskan bahwa metode ini efektif dalam memperkuat literasi demokrasi digital dan ketahanan peserta terhadap disinformasi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMK Taruna Jaya berfokus pada penguatan literasi demokrasi digital bagi generasi muda dalam rangka menangkal disinformasi politik yang semakin masif di era media sosial. Disinformasi politik menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi, terutama karena sifatnya yang mudah menyebar melalui algoritma platform digital yang memprioritaskan konten viral meskipun tidak akurat. Kondisi ini kian berbahaya bagi siswa usia remaja yang merupakan pengguna aktif media sosial namun memiliki literasi digital yang beragam. Berdasarkan pemetaan awal, sejumlah siswa menunjukkan keterbatasan dalam membedakan informasi kredibel dengan informasi manipulatif. Karena itu, kegiatan sosialisasi dirancang melalui beberapa tahapan yang meliputi penyampaian materi literasi demokrasi digital, simulasi identifikasi disinformasi, pembentukan duta literasi digital, dan diskusi terfokus. Tahapan ini sejalan dengan model literasi digital kritis yang menekankan aspek kognitif, afektif, dan partisipatoris dalam menghadapi arus informasi (Hobs, 2021).

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa mengenai konsep demokrasi digital, etika bermedia sosial, serta cara kerja disinformasi politik. Peningkatan ini diukur melalui instrumen pre-test dan post-test yang memperlihatkan perbedaan skor signifikan pada pemahaman peserta. Selain itu, simulasi *fact-checking* memberikan pemahaman praktis kepada siswa untuk melakukan verifikasi informasi menggunakan teknik pencarian balik gambar, analisis framing, serta identifikasi sumber. Latihan ini terbukti efektif meningkatkan kemampuan analitis siswa, sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa intervensi berbasis praktik dapat mendorong peningkatan literasi informasi secara lebih berkelanjutan (Lewandowsky, 2020). Indikator keberhasilan kegiatan terlihat dari kemampuan sebagian besar siswa dalam mengidentifikasi setidaknya tiga dari lima contoh konten disinformasi politik yang diberikan. Peserta juga menyatakan lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi politik setelah mengikuti kegiatan ini.

Tabel 1. Hasil Pre-Test dan Post-Test

Aspek Literasi Digital	Skor Maksimal	Rata-rata Pre-Test	Rata-rata Post-Test	Peningkatan (%)
Pemahaman Demokrasi Digital	100	48	80	66.7%
Pengetahuan Disinformasi	100	42	78	85.7%
Kemampuan Analisis Konten	100	38	74	94.7%

Etika Media Sosial	100	55	85	54.5%
<b>Rata-rata Total</b>	<b>100</b>	<b>45.7</b>	<b>79.2</b>	<b>73.3%</b>

Selain peningkatan pengetahuan dan keterampilan, kegiatan ini juga menghasilkan luaran berupa pembentukan kelompok duta literasi digital yang bertugas membuat poster digital dan kampanye edukatif di media sosial sekolah. Produk kampanye yang dihasilkan dinilai cukup baik dari sisi kreativitas dan ketepatan pesan, meskipun jangkauan penyebarannya masih terbatas pada lingkungan sekolah. Keberadaan duta literasi digital menjadi langkah awal penting untuk memperluas upaya penyadaran publik secara berkelanjutan, sejalan dengan rekomendasi yang menekankan pentingnya *peer-led digital literacy* dalam lingkungan pendidikan. Namun demikian, kegiatan ini juga menghadapi beberapa kendala, terutama terkait variasi kemampuan awal siswa, keterbatasan perangkat teknologi, dan waktu pelaksanaan yang relatif singkat sehingga pendalaman materi belum dapat dilakukan secara optimal.



Gambar 2: Suasana kelas di sekolah SMK Taruna Jaya Gresik dalam persiapan pemberian materi pengabdian

Dari sisi keunggulan, program ini dianggap relevan dengan kebutuhan siswa SMK yang sehari-hari berinteraksi dengan media sosial dan rentan terhadap paparan informasi politik yang menyesatkan. Model kegiatan yang memadukan penjelasan teoretis dengan praktik langsung membuat siswa lebih mudah memahami dan menerapkan keterampilan verifikasi informasi dalam konteks nyata. Modul edukatif yang digunakan juga dinilai adaptif karena dapat direplikasi oleh sekolah lain tanpa membutuhkan teknologi tinggi. Dibandingkan dengan program pengabdian sebelumnya yang cenderung berhenti pada sosialisasi satu arah tanpa pelatihan teknis serta tidak menghasilkan luaran yang berkelanjutan, program ini terbukti lebih progresif karena menekankan pada penguatan kemampuan peserta melalui *learning by doing* serta menghasilkan kader literasi yang dapat meneruskan dampak kegiatan. Dalam sesi praktik, sebanyak 5 konten digital diverifikasi, meliputi berita politik, unggahan media sosial, dan konten grafis kampanye, sehingga peserta berhadapan langsung dengan jenis disinformasi yang beragam. Selain itu, peserta menghasilkan 4 poster kampanye digital literasi demokrasi yang disebarluaskan di media sosial dan lingkungan sekolah. Melalui kampanye digital dan berbagi konten literasi, menunjukkan adanya jangkauan dampak yang lebih luas daripada hanya pembelajaran di ruang kelas. Meski demikian, terdapat beberapa kelemahan, di antaranya kebutuhan pendampingan tambahan bagi sebagian siswa karena perbedaan keterampilan dasar literasi digital, serta keterbatasan perangkat yang menyebabkan beberapa peserta harus berbagi gawai dalam simulasi fact-checking sehingga mengurangi efektivitas latihan. Secara keseluruhan, tingkat kesulitan pelaksanaan tergolong moderat karena pendamping perlu menyederhanakan konsep demokrasi digital agar tetap mudah dipahami oleh siswa sekolah menengah, tanpa mengurangi kedalaman substansi pembelajaran.

Meski terdapat hambatan/kelemahan, kegiatan ini memiliki peluang pengembangan yang signifikan ke depan. Pembentukan duta literasi digital dapat dikembangkan menjadi komunitas literasi sekolah yang aktif

melakukan edukasi publik terkait keamanan digital, etika berpendapat, dan teknik verifikasi konten. Program ini juga memiliki potensi diperluas melalui kolaborasi lintas sekolah dan pemanfaatan media digital seperti video edukatif, *microlearning*, dan podcast. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan literasi demokrasi digital siswa, tetapi juga membuka jalan untuk penguatan ketahanan demokrasi dalam jangka panjang melalui pemberdayaan generasi muda sebagai aktor literasi digital yang kritis dan partisipatif.



Gambar 3: Pemberian materi pengabdian

#### IV. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi penguatan literasi demokrasi digital bagi generasi muda di SMK Taruna Jaya berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, ditunjukkan oleh peningkatan signifikan pada pengetahuan, kemampuan analisis, dan kesadaran kritis siswa dalam menghadapi disinformasi politik di media sosial. Pendekatan berbasis *digital civic education* dan pelatihan praktik *fact-checking* terbukti efektif dalam membangun kehati-hatian peserta dalam menerima dan menyebarkan informasi politik, serta menghasilkan duta literasi digital yang mampu melakukan advokasi sederhana mengenai etika bermedia sosial. Meskipun terdapat kendala seperti variasi kemampuan awal dan keterbatasan perangkat teknologi, kegiatan tetap memberikan dampak positif dalam memperkuat ketahanan siswa terhadap disinformasi politik. Sebagai rekomendasi, diperlukan keberlanjutan program melalui pendampingan berkala bagi duta literasi digital, integrasi modul literasi demokrasi digital dalam kegiatan ekstrakurikuler, peningkatan dukungan teknologi sekolah untuk praktik *fact-checking*, serta penguatan kolaborasi antar sekolah untuk memperluas kampanye literasi digital. Optimalisasi media sosial sekolah dan organisasi siswa juga direkomendasikan sebagai saluran edukasi berkelanjutan agar dampak program terus berkembang dan menjangkau audiens yang lebih luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agma, A. R. (2025). *Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial: Strategi Literasi Digital untuk Meningkatkan Kesadaran Publik* *Jurnal Komunikasi dan Media*. 1(1), 30–36.
- Bulya, B., & Izzati, S. (2024). *Indonesia's Digital Literacy as a Challenge for Democracy in the Digital Age*. 8(148), 640–661. <https://doi.org/10.26740/jsm.v8n2.p640-661>
- Fernandes, R., & Akbar, A. (2025). Literasi Politik di Era Demokrasi Digital: Analisis Kewaspadaan Pemilih terhadap Hoaks Pemilu di Kota Pariaman. *Jurnal Kajian Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 171–188.

---

<https://doi.org/10.63082/jksh.v1i3.23>

Hobs, R. (2021). *Digital and Media Literacy: A Plan of Action*.

Ihle, K. A. (2018). *Participatory Culture in a Networked Era*. December, 10–13.

<https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1417462>

Khairuddin. (2025). *Partisipasi Politik Anak Muda: Kajian Sosiologis terhadap Aktivisme Digital*. 1(1), 22–33.

Komara & Widjaya. (2024). *Memahami Perilaku Informasi Gen-Z dan Strategi Melawan Disinformasi : Sebuah Tinjauan Literatur Penggunaan Media Sosial*. 10(2).

Laventia, F., & Faizal, A. (2025). *Pendidikan Politik di Era Digital : Media Sosial sebagai Katalis atau Distorsi ?* 4(1), 423–427.

Lewandowsky. (2020). *The Debunking Handbook*.

Mihailidis, P. (2018). *Civic Media Literacies: Re-Imagining Human Connection in an Age of Digital Abundance*.

Muhamad, A., & Nasoha, M. (2025). *Demokrasi Digital dan Polarisasi Politik : Strategi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Civic Unity Digital Democracy and Political Polarization : Citizenship Education Strategy in Building Civic Unity*. 2(5), 687–696.

Mustofa. (2024). *E-democracy In Indonesia: Use Of Social Media And Challenges In Encouraging Youth Political Participation*. 9(1), 102–111. <https://doi.org/10.24198/jwp.v9i1.52775>

Nathanael, G. K. (2023). *Trend of Digital Literacy Skill Research in Communication Education Journals across Indonesia : from Research Design to Data Analysis*. 7(2), 79–90.

Sari, Y. (2025). *Literasi Digital Sebagai Fondasi Pendidikan Politik Generasi Muda Era Digital*. 8, 175–184.

Umar Yadi Idris. (2025). *Media sosial dan transformasi komunikasi politik umar yadi idris*. 8(2), 49–71.

Wardle, C. (2017). *Information Disorder : Toward an interdisciplinary framework for research and policy making Council of Europe report*.

Zaky, I., & Fatih, A. (2024). *Peran Media Sosial dalam Kampanye Politik di Indonesia Lima Tahun Terakhir : Antara Demokrasi dan Manipulasi Informasi*. 4(7), 2227–2237. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i7.2611>